

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service Delivery)

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA KAB. DHARMASRAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tujuan : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan	Akses : SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan Partisipasi: Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal Control: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten Manfaat : • Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan dasar yang disediakan oleh pemda untuk kesejahteraan	• Kesulitan dalam meng-konversi SPM kedalam dokumen perencanaan • Kesadaran daerah untuk menempatkan SPM sebagai prioritas pembangunan (dalam perencanaan dan penganggaran)	• Masih multi tafsir atas konsep SPM sesuai UU 23/2014 • Kelengkapan data • Regulasi yang harmonis terkait penganggaran SPM (UU,PP, permanen)	SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan	• Pengintegrasian SPM dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, SKPD) • Ketersediaan data • penghitungan kebutuhan • Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar • Pelaksanaan pemenuhan • Kebijakan daerah	• Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan • Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia	Out put Tersusun laporan penerap SPM Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 Out come Tercapainya kebutuhan SPM banyak target 100%

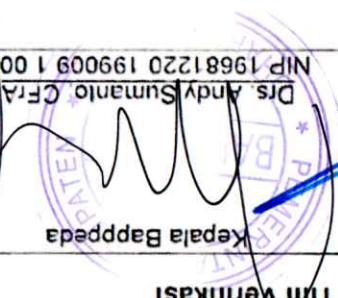
	urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.	masyarakat • Ponda akan memonitoraskan SPM menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas ponda kepada masyarakat (masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan publik)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pulau Pinjung, 07 April 2021
 Kepala Pemerintahan dan Otd

 ASRIL AP MSI
 NIP. 19150225 199501 1 001

Inspektur Kadam, S.Sos NIP 19680607 199103 1 004	Kepala BKD Parhamto, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanilo, C.FrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala PPKB Dedy P Riza, S.STP, M.Si NIP 19620521 198012 1 002
--	---	--	--

Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bag. Pemerintahan dan Otda
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
KODE PROGRAM	4.01.02	
KEGIATAN	Administrasi Tata Pemerintah	
HASIL/OUTPUT	- Tersedianya buku Laporan Penerapan SPM Tahun 2020 - Meningkatkan skor kinerja laporan penyelenggaraan Pemda	
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; - Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; - Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; - Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan. b. Penyebab Internal - Kesulitan dalam meng-konversi SPM kedalam dokumen perencanaan. - Kesadaran daerah untuk menempatkan SPM sebagai prioritas pembangunan (dalam perencanaan dan penganggaran). c. Penyebab Eksternal - Masih multi tafsir atas konsep SPM sesuai UU 23/2014 - Kelengkapan data - Regulasi yang harmonis terkait penganggaran SPM (UU,PP, Permen)	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Pengintegrasian SPM dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja PD)
	Komponen/ Aktifitas 2	Ketersediaan data
	Komponen/ Aktifitas 3	Penghitungan kebutuhan
	Komponen/ Aktifitas 4	Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar
	Komponen/ Aktifitas 5	Pelaksanaan pemenuhan
	Komponen/ Aktifitas 6	Kebijakan daerah
	Rencana Anggaran	175.000.000

Capaian Program (level kegiatan)	Out put Tersusun laporan penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 Out come Tercapai target pemenuhan SPM 100 persen
-------------------------------------	---

Pulau Punjung, 07 April 2021

Kabag. Pemerintahan dan Otda,

ASRIL, AP., M.Si.
NIP. 19750225 199501 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandung, S Sos NIP 19670507 199103 1 004	Kepala BKD  Parwanto, S Sos M T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, CPA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A  Bobby P Riza, S STP M Si NIP 19820521 200012 1 002
--	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program		Laporan capaian SPM di OPD Pelaksana Pelayanan Dasar
Kegiatan		Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayan Minimal Bidang Kesehatan.
	Gambaran Umum	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disampaikan merupakan amanat dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa Laporan Penerapan SPM disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan Laporan Penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
	Indikator Kinerja	Persentase capaian SPM urusan : 1. urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, spm untuk urusan pemerintah ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan : a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. sub urusan kebakaran; c. sub urusan bencana. 6. urusan pemerintahan bidang sosial.
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan Tujuan		Penyampaian laporan penerapan SPM juga akan menjadi bagian materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah pada Kementrian Dalam Negeri setiap tahunnya. Adapun laporan SPM dimaksud muatannya yaitu: Hasil Penerapan SPM, Kendala Penerapan SPM serta ketersediaan Anggaran dalam penerapan

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021

Urusan : Pendukung/ Penunjang Urusan Pemerintahan						
Unit Organisasi	4 01 0 00 0 00 01 0000	Sekretariat Daerah				
Sub Unit Organisasi	4 01 0 00 0 00 01 0000	Sekretariat Daerah				
Program	4 01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
Kegiatan	4 01.02.2 01	Administrasi Tata Pemerintahan				
Sub Kegiatan	4 01.02.2 01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2021				
Kelompok Sasaran		OPD Pelaksanaan SPM				
Jumlah 2021						
Jumlah 2022		126.161.000				
Jumlah 2023						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		126.161.000				
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					126.161.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					23.860.000
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					23.860.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					3.532.500

	BBM Bensin Spesifikasi : Pertalite	450	liter	7.850	0	3.532.500
5.1.02.01.01.0024	Makan dan Minuman Spesifikasi : Snack dan Nasi Bungkus	350	bungkus	30.000	0	10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					75.806.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					73.046.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					75.806.000
Grand Total						126.161.000

Pulau Punjung, 07 April 2021

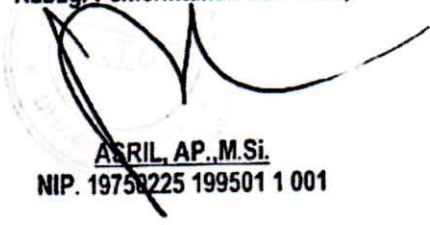
Kabag. Pemerintahan dan Otda

ASRIL, AP., M.Si.
NIP. 19750225 199501 1 001

	SPM. Hasil pelaporan SPM Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam : 1. Penilaian kinerja perangkat daerah; 2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	1. Penerapan 2. Pelaporan 3. Pembinaan 4. Pengawasan SPM
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PUPR 4. Dinas Perkimtan 5. Dinas Sosial P3APKB 6. Dinas Satpol PP dan Damkar 7. BPBD 8. Bag. Pemerintahan dan Otda Setda (Pelaporan)
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : untuk laporan SPM berada dibagian Pemerintahan dan Otda Penanggung Jawab : Bupati Dharmasraya
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya	Rp. 175.000.000,-

Pulau Punjung, 07 April 2021

Kabag. Pemerintahan dan Otda,


ASRIL, AP., M.Si.

NIP. 19750225 199501 1 001